

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kemacetan dan Transportasi Prioritas Utama

DPRD dan Pemprov DKI Sepakati RAPBD Rp 87,95 Triliun

JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 akan diprioritaskan pada penyediaan transportasi massal dalam rangka penanggulangan kemacetan dan penugasan beberapa proyek infrastruktur pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat membacakan garis besar RAPBD tahun anggaran 2020 di hadapan sidang paripurna DPRD DKI Jakarta kemarin.

Anies mengatakan APBD 2020 tetap difokuskan pada implementasi program-program strategis yang dirincikan dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD). KSD ini disusun sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi program-program strategis yang kita sebut juga sebagai KSD akan terus kita laksanakan di 2020. Kita bersyukur, beberapa program strategis itu disepakati bersama dengan baik. Jadi kita berharap semua KSD itu bisa dilaksanakan secara berkesinambungan," kata Anies.

Dia menjelaskan, total RAPBD 2020 sebesar Rp87,95 triliun atau meningkat sebesar 1,22% bila dibandingkan APBD Perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp,86,89 triliun. Pendapatan daerah tahun

2020 direncanakan sebesar Rp82,19 triliun atau meningkat 9,60% bila dibandingkan dengan APBD Perubahan 2019 sebesar Rp74,99 triliun.

Rencana pendapatan daerah tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp57,56 triliun, Dana Perimbangan Rp21,61 triliun serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp,3,01 triliun.

Rencana PAD diharapkan diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp50,17 triliun, retribusi daerah Rp755,75 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp750,00 miliar, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp5,88 triliun.

"Untuk mengoptimalkan angka tersebut, ada beberapa kebijakan pendapatan daerah yang harus ditingkatkan. Di antaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan pelayanan retribusi daerah, kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah," ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Pada bagian akhir dari pe-

nyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2020, Anies menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan pada 2020 direncanakan sebesar Rp5,76 triliun berasal dari SiLPA 2019 yang diproyeksikan mencapai Rp,5,50 triliun serta penerimaan pinjaman untuk proyek MRT sebesar Rp60,15 miliar.

Adapun untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp8,34 triliun yang dialokasikan kepada BUMD dalam rangka penyediaan transportasi massal, penanggulangan kemacetan, dan penugasan beberapa proyek infrastruktur yang antara lain penyediaan hunian DP 0 (nol) Rupiah serta pemberian pinjaman daerah dan pembayaran utang pokok.

Anggota Badan Anggaran (Bagggar) DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menuturkan, penyusunan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahunan sebagai dasar RAPBD semuanya sudah sesuai dengan RPJMD. Hanya saja ada beberapa prioritas. Menurutnya, apabila visi-misinya maju kota-tanya dan bahagia warganya, Pemprov DKI harus bisa memprioritaskan kegiatan sektor menengah kebawah.

Misalnya peningkatan daerah kumuh melalui peningkatan sarana dan prasarannya. Dengan demikian, kata dia, masyarakat bisa hidup sehat dan bahagia. Kemudian pembenahan kantor-kantor kegiatan di masyarakat, baik kantor RW, lurah ataupun kecamatan.

● bima setiyadi